

Volume 9, Nomor 1 (Juni 2015)

ISSN : 1829 - 975X

# HISTORIA

**JURNAL ILMU SEJARAH**

**PERANAN GURU PADA MASA KOLONIAL BELANDA**

*Dewi Salindri*

**KONFLIK ELITE LOKAL DI BANYUWANGI**

*Sunarlan*

**KONSEP KEKUASAAN DAN LEGITIMASI DI  
KERAJAAN MATARAM**

*Edy Burhan Arifin*

**KESENIAN TOPENG DALANG MADURA DI  
KABUPATEN SUMENEP**

*Bambang Samsu Badriyanto*

**KOMODIFIKASI HISTORI DALAM SINEMA INDONESIA**

*Bambang Aris Kartika*

**BAHASA DALAM DINAMIKA SOSIAL BUDAYADI INDONESIA**

*Sri Ana Handayan*



**JURUSAN SEJARAH FAKULTAS SASTRA  
UNIVERSITAS JEMBER**

## DAFTAR ISI

1. **PERANAN GURU PADA MASA KOLONIAL BELANDA**  
Dewi Salindri ..... 1-12
2. **KONFLIK ELITE LOKAL DI BANYUWANGI: Studi Tentang Konflik Elite NU di Banyuwangi Tahun 2002**  
Sunarlan..... 13-34
3. **KONSEP KEKUASAAN DAN LEGITIMASI DI KERAJAAN MATARAM**  
Edy Burhaan Arifin..... 35-48
4. **KESENIAN TOPENG DALANG MADURA DI KABUPATEN SUMENEP**  
Bambang Samsu Badriyanto..... 49-66
5. **KOMODIFIKASI HISTORI DALAM SINEMA INDONESIA**  
Bmbang Aris Kartika..... 67-82
6. **BAHASA DALAM DINAMIKA SOSIAL BUDAYA DI INDONESIA**  
Sri Ana Handayani..... 83-90

**PERANAN GURU  
PADA MASA PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA**

---

**Dewi Salindri\***

---

**Abstract:**

Peranan guru kurang penting pada awal Pemerintah Kolonial Belanda di Hindia Belanda, karena belum ada sistem pendidikan terencana. Namun semenjak tahun 1848 Pemerintah Kolonial Belanda menyediakan anggaran belanja bidang pendidikan bagi pribumi sebesar 25.000 gulden, artinya peranan guru mulai diperhatikan sesuai dengan situasi di Belanda maupun di Hindia Belanda, walaupun ada diskriminasi. Peranan guru meningkat sejak pemerintah banyak mendirikan sekolah formal tingkat rendah, sehingga Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1892 memutuskan untuk mengangkat guru tanpa pendidikan guru, tetapi melalui ujian guru. Cara ini dilakukan, karena sedikit yang mau menjadi guru, bahkan profesi guru hanya dipakai sebagai batu loncatan menjadi pegawai pamongpraja. Untuk menarik minat siswa supaya memasuki Sekolah Guru, maka Pemerintah Kolonial Belanda berusaha memberikan fasilitas yang menarik bagi calon siswa. Peranan guru semakin meningkat ketika politik etis dicanangkan. Secara politis peranan guru diharapkan dapat meningkatkan loyalitas pribumi kepada pemerintah dan bagi pribumi peranan guru mampu meningkatkan status sosialnya untuk memasuki dunia kepriyayan.

Keyword: guru, priyayi, pamongpraja

**1. Pendahuluan**

Judul makalah adalah Peranan Guru Pada Masa Pemerintahan Kolonial Belanda, yang akan membahas tentang peranan guru dalam bidang pendidikan dan pengajaran pada masa Pemerintah Kolonial Belanda. Pemilihan judul ini dilatar belakangi adanya berita-berita tentang nasib guru yang kurang beruntung terutama di tempat-tempat terpencil dan guru-guru swasta yang sangat minim gajinya, walaupun sekarang guru yang tersertifikasi sudah cukup layak kehidupannya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, penulis mencoba untuk mengkaji bagaimana peranan guru sekolah rendah yang diselenggarakan pada masa Pemerintah Kolonial Belanda. Perubahan meliputi peranan Pemerintah Kolonial Belanda sebagai penyelenggara sistem pendidikan, guru sebagai tenaga pelaksana

---

\* Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember

dan sekolah sebagai sarannya. Peranan guru tentu berkaitan dengan perluasan sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda berdasarkan kepentingan politik dan ekonominya. Ada 3 masa perkembangan sekolah dan guru yaitu masa Tanam Paksa (Cultur Stelsel), masa Politik Liberal dan masa Politik Etis.

Masa Tanam Paksa yaitu suatu masa yang mewajibkan para petani di Jawa untuk menanam tanaman perdagangan, yang diekspor ke pasar dunia<sup>1</sup>. Sistem ini berusaha menggabungkan berbagai unsur yaitu Pemerintah Kolonial Belanda, penguasa Jawa, organisasi desa, tenaga kerja, rakyat Jawa, tanah pertanian rakyat dan lain-lain<sup>2</sup>. Selain itu juga melibatkan rakyat Jawa sebagai tenaga pelaksana untuk dinas perkebunan. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial Belanda menyediakan anggaran belanja negara sebesar 25.000 gulden bagi pendidikan anak-anak pribumi dari kalangan priyayi tahun 1848. Perluasan sekolah bertujuan untuk mendidik calon pegawai tingkat rendah yang dapat membaca, menulis, dan berhitung dengan guru dengan klasifikasi ijazah tertentu.

Masa Politik Liberal ditandai adanya usaha dan modal swasta yang diberi peluang di Indonesia, juga hak milik petani atas tanah mereka dilindungi (Undang-Undang Agraria tahun 1870). Namun pada abad XIX di Pulau Jawa mengalami penurunan tingkat hidup masyarakat, karena banyak pengangguran, pajak yang berat dan terjadi krisis gula tahun 1885. Hal ini mengakibatkan Pemerintah Kolonial Belanda melakukan penghematan anggaran belanja bidang pendidikan, sehingga perluasan sekolah guru dihentikan.

Masa Politik etis yang terkenal dengan kebijakan triloginya meliputi irigasi, edukasi dan transmigrasi. Pada masa ini Pemerintah Kolonial Belanda banyak melakukan perubahan-perubahan dalam bidang pendidikan. Tindakannya antara lain membuka kesempatan bagi anak-anak pribumi untuk memasuki sekolah-sekolah Belanda dan mendirikan sekolah-sekolah lanjutan.

---

<sup>1</sup> Sartono Kartodirdjo, *Sejarah Nasional IV*, ( Jakarta: Departemen P & K. 1975), hlm. 74.

<sup>2</sup> D.H. Burger, *Sejarah Ekonomi Sosiologi II*. (Jakarta: t.p.,1970), hlm.175).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

- 1) mengapa Pemerintah Kolonial Belanda pada awalnya kurang memperhatikan peranan guru?
- 2) Apa yang menyebabkan peranan guru semakin meningkat?
- 3) Apa dampak peranan guru bagi Pemerintah Kolonial Belanda dan pribumi?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana peranan guru pada masa Pemerintah Kolonial Belanda.

Dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengkaji peranan pada masa Pemerintah Kolonial Belanda, sehingga dapat melihat sisi positif dan negatif peranan guru pada waktu itu dan masa kini.

Pengertian guru dalam makalah ini adalah guru-guru pribumi di sekolah-sekolah tingkat rendah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda, yang memberikan pendidikan formal. Pendidikan formal adalah pendidikan sekolah yang teratur, bertingkat dan mengikuti syarat-syarat yang jelas dan ketat<sup>3</sup>. Skope temporal yang membatasi permasalahan dalam makalah ini dimulai pertengahan Abad XIX (awal perluasan sekolah) sampai awal abad XX masa Politik Etis (saat perluasan sekolah mengalami perkembangan). Skope spasial makalah ini adalah Jawa, karena Pemerintah Kolonial Belanda lebih mengutamakan Jawa sebagai tempat perluasan sekolah, karena diharapkan akan dapat memberikan keuntungan secara politis dan ekonomi.

## 2. Pembahasan

Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia sekitar abad XVI membawa pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Portugis yang pertama kali datang ke Indonesia untuk meluaskan daerah pengaruhnya, dengan motif penyebaran agama, tetapi yang terutama adalah motif ekonomi<sup>4</sup>. Pengaruh Portugis dalam bidang pendidikan dibuktikan dengan pendirian seminari di Ternate tahun 1536

---

<sup>3</sup> S.T. Vembriarto, *Kapita Selekta Pendidikan*, (Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Paramita, 1981), hlm. 98.

<sup>4</sup> Sartono Kartodirdjo, *op. cit.* hlm.33.

dengan tujuan untuk menyiarkan agama Katholik melalui bidang pendidikan<sup>5</sup>.

Sedangkan kedatangan bangsa Spanyol di wilayah Indonesia bagian timur tidak memberikan pengaruh terhadap sistem pendidikan di Indonesia, karena keberadaan mereka di Indonesia tidak lama dan sering terlibat perang dengan Portugis.

Bangsa Belanda yang datang ke Hindia Belanda dengan motif ekonomi, pada mulanya tidak menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, artinya tidak ada sistem pendidikan yang direncanakan. Ada 3 masa yang membedakan kebijaksanaan Pemerintah Kolonial Belanda dalam bidang pendidikan berkaitan dengan kepentingan politik dan ekonominya yaitu:

## 2.1 Masa V. O. C.

V.O.C. (*Vereenigde Oost Indische Compagnie*) adalah nama organisasi perdagangan bangsa Belanda yang didirikan tahun 1602. Perhatian V.O.C. dalam bidang pendidikan karena berkaitan dengan perluasan agama Kristen Protestan dengan pendirian sekolah-sekolah yang berbasis keagamaan. Pada tahun 1617 ada instruksi agar V.O.C. memperkembangkan agama Kristen dan mendirikan sekolah-sekolah untuk membendung perkembangan agama Katholik. Sekolah-sekolah tersebut didirikan dan dibiayai oleh V.O.C.<sup>6</sup> Guru-guru didatangkan dari negeri Belanda dengan tugas memupuk rasa takut terhadap Tuhan, mengajarkan dasar-dasar agama Kristen, mengajar anak berdoa, bernyanyi, pergi ke gereja, mematuhi orang tua, penguasa dan guru-guru<sup>7</sup>. Guru diangkat oleh Gereja Reformasi di Amsterdam dan dikirim ke tanah jajahan. Kesulitan yang dialami guru-guru tersebut adalah masalah bahasa, karena murid-murid di Ambon dan Batavia tidak mengerti bahasa Belanda melainkan bahasa Melayu dan Portugis.

Setelah V.O.C dibubarkan tahun 1799 dan segala kekuasaannya diambilalih oleh Pemerintah Kolonial Belanda, maka usaha-usaha dalam bidang

---

<sup>5</sup> Moh. Said, *Pendidikan Abad Keduapuluh. Dengan Latar Belakang Kebudayaan*, (Jakarta: Mutiara, 1981), hlm.42

<sup>6</sup> Ibid. hlm.43.

<sup>7</sup> Nasution, *Sejarah Pendidikan Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm.5.

pendidikan merosot karena ketiadaan guru dan pendeta. Demikian juga pada masa pemerintahan Herman Willem Daendels tahun 1808-1811 masih menyelenggarakan pendidikan berdasarkan agama Kristen. Keadaan ini tidak berubah pada masa interegnum Inggris tahun 1611-1816 yang tidak membawa perubahan dalam bidang pendidikan.

Ketika kekuasaan kembali kepada Pemerintah Kolonial Belanda tahun 1816 tidak ada perluasan dalam bidang pendidikan. Hal ini berkaitan adanya statuta Hindia Belanda yang menyatakan bahwa tanah jajahan harus memberikan keuntungan yang sebesar-besarnya bagi usaha perdagangan, sehingga menambah kekayaan negeri Belanda. Oleh karena itu Pemerintah Kolonial Belanda kembali menjalankan cara-cara V.O.C. untuk memperoleh keuntungan secara ekonomi.

Sekolah pertama bagi anak-anak Belanda dibuka di Jakarta tahun 1817 yaitu E.L.S. (Europese Large School) dan segera diikuti kota-kota lain di Jawa. Bagi masyarakat pribumi pendidikan Barat dianggap tidak perlu dan membahayakan, karena membawa resiko menjadi terasing dengan kebudayaan sendiri dan kemungkinan terseret menjadi Kristen<sup>8</sup>. Hal ini dibuktikan dari penelitian terhadap masyarakat Jawa yang dilakukan oleh 12 orang residen berdasarkan keputusan Gubernur Jenderal Van der Capellen pada tanggal 8 Maret 1819 menunjukkan:

- a. adanya beberapa orang juru tulis yang memberi pelajaran bahasa dan huruf Arab, Jawa dan Latin,
- b. adanya pendidikan agama Islam yang memberi pelajaran bahasa Arab.

Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan tradisional yang berorientasi keagamaan masih dominan, selain itu ada minat orang Jawa untuk mempelajari huruf Latin.

Para Residen juga mengadakan usaha perorangan dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk mendidik tenaga-tenaga pribumi yang murid-muridnya diambil dari anak orang-orang terkemuka setempat. Tujuannya untuk mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan terutama di kantor-kantor residen.

---

<sup>8</sup> Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1983), hlm. 99.

Contoh: J.C. Ellinghujsen (Pasuruan) tahun 1835 dan Valck (Karawang) tahun 1824<sup>9</sup>.

## 2.2. Masa Tanam Paksa

Sistem Tanam Paksa yang diterapkan di Hindia Belanda tahun 1830 memaksa Pemerintah Kolonial Belanda untuk menambah jumlah sekolah dasar, karena kebutuhan akan tenaga kerja tingkat rendah yang dapat membaca, menulis dan berhitung semakin meningkat. Selain itu Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1848 menyediakan anggaran belanja, kurikulum, persyaratan masuk dan tenaga guru dengan klasifikasi ijazah tertentu untuk pendirian sekolah bagi pribumi sebesar 25.000 gulden<sup>10</sup>, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Sekolah-sekolah ini dimaksudkan untuk mendidik pegawai pribumi yang dipilih dari anak-anak kaum ningrat.

Selain itu dikalangan pribumi pada pertengahan abad XIX berdiri sekolah-sekolah atas usaha beberapa orang bupati dengan inisiatif dan biaya sendiri contoh: Bupati Banyumas, Bupati Bagelen dan lain-lain (Chijs, 1864: 271-272). Usaha para bupati ini semakin meningkat pada akhir abad XIX dengan memberikan tambahan pelajaran di rumahnya seperti yang diterima oleh anak-anak Belanda dengan bahasa pengantar dan guru-guru Belanda. Akibatnya lahirlah kaum intelektual yang berorientasi Barat di Jawa yang mula-mula lahir dari lingkungan priyayi, khususnya keluarga bupati. Contoh: Bupati Serang (P.A.A. Achmad Djajadiningrat) dan Bupati Ngawi (R.M.T. Koesoemo Oetaya)<sup>11</sup>. Dengan adanya perluasan sekolah, maka diperlukan guru sebagai pelaksana, sedangkan pemerintah Kolonial Belanda berusaha memenuhi kebutuhan guru dengan mendirikan sekolah guru (Kweek School) tahun 1852 di Solo dan diikuti oleh 10 lembaga serupa di pusat-pusat bahasa di Hindia Belanda

---

<sup>9</sup> J.A. van der Chijs, *Bijdragen van het Inlandesch Onderwijs in Nederlandsch Indie*. BKI. No 11 1984 dalam Scherer Savitri Prastiti, 1985. *Keselarasan dan Kejanggalan Pemikiran- Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa awal Abad XX*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm. 221-223.

<sup>10</sup> Heather Sutherland, *op.cit.* hlm.32.

<sup>11</sup> R.A. Kartini, *Habis Gelap Terbitlah Terang*. (Jakarta: Balai Pustaka, 1962), hlm. 9.



Sebelum Sekolah Guru dapat menghasilkan jumlah guru yang cukup, maka tidak diadakan syarat khusus untuk melakukan profesi ini. Oleh karena itu banyak dijumpai hal-hal yang tidak memenuhi syarat bagi berlangsungnya proses belajar mengajar seperti tempat untuk proses belajar mengajar berupa gudang atau bekas kantor, kemampuan belajar guru rendah, dan jumlah murid terlalu banyak dalam satu kelas, contoh: tahun 1859 seorang guru di Kaibobo (Serang) menghadapi 260 murid dan di Manado menghadapi 260 murid. Sekolah guru pada taraf permulaannya seperti sekolah tingkat rendah.

Usaha Pemerintah Kolonial Belanda untuk memenuhi kebutuhan guru melalui Sekolah Guru ternyata kurang berhasil. Hal ini dapat dilihat dari jumlah guru yang lulus dari Sekolah Guru tahun 1887 sampai tahun 1892 hanya 200 orang, berarti 40 orang setiap tahun. Keadaan ini menyebabkan Pemerintah Kolonial Belanda memutuskan untuk mengangkat guru tanpa pendidikan sebagai guru, dengan mengadakan ujian bagi mereka yang ingin mendapat kualifikasi guru tanpa melalui Sekolah Guru. Oleh karena itu dikenal 5 macam guru yaitu:

- a. Guru yang berwenang penuh, karena lulus Sekolah Guru;
- b. Guru melalui ujian guru tanpa menempuh Sekolah Guru, karena itu mendapat gaji yang lebih rendah;
- c. Guru bantu yang mendapat wewenang menjadi guru setelah melalui ujian guru bantu;
- d. Calon guru (magang) yang mempelajari seluk beluk mengajar;
- e. Guru darurat.

Perbedaan guru berdasarkan latar belakang pendidikannya ini, menyebabkan guru-guru berpendidikan memandang remeh guru-guru yang tidak mendapat pendidikan di Sekolah Guru. Sedikitnya lulusan Sekolah Guru selain disebabkan jumlah sekolah guru terbatas, juga disebabkan minat siswa untuk memasuki sekolah guru kurang. Selain itu anak-anak priyayi sering mempergunakan profesi guru sebagai batu loncatan untuk memperoleh pekerjaan di kantor pemerintah yang lebih terhormat menurut mereka.

Syaratnya untuk memasuki Sekolah Guru adalah siswa harus berusia 14 tahun maksimum 17 tahun. Ada kalanya siswa yang tidak mempunyai surat

kelahiran, tidak mempunyai pengetahuan bahasa Melayu, berhitung dan membaca terpaksa harus diterima karena kekurangan siswa.

Untuk menarik siswa memasuki Sekolah Guru, maka Pemerintah Kolonial Belanda menetapkan kenaikan gaji guru yang cukup besar yaitu dari f. 30 – f. 50 sebulan menjadi f. 75- f. 150 sebulan bagi guru berwenang pada tahun 1878. Selain itu Pemerintah Kolonial Belanda juga memberikan pangkat *Mantri Guru* dan hak untuk tampil di depan umum dengan sebuah payung, tombak, tikar, seperangkat buah pinang, dan uang untuk biaya empat orang pengiring tanda-tanda kehormatan<sup>12</sup>. Pemberian gelar *Mantri Guru* dan atribut kepriyayian bertujuan agar para guru mempunyai loyalitas yang tinggi kepada Pemerintah Kolonial Belanda dan menerapkan hal tersebut kepada murid-muridnya. Dengan adanya tanda-tanda kehormatan itu akan membangkitkan rasa hormat orang, termasuk murid-muridnya sendiri dan khususnya kaum ningrat<sup>13</sup>. Dengan demikian kedudukan guru dalam stratifikasi sosial masyarakat mengalami mobilitas vertikal, karena mendapat gelar dan atribut kepriyayian. Menurut Scherer<sup>14</sup> golongan priyayi adalah pegawai Pemerintah Kolonial Belanda sebagai akibat pendidikan Barat yang mulai meluas sesuai dengan kepentingan kolonial yang makin meningkat pada akhir abad XIX dan permulaan abad XX. Ada 2 golongan priyayi yaitu:

- a. priyayi birokrasi yaitu golongan priyayi yang menduduki jabatan-jabatan pangrehpraja dan meneruskan tradisi priyayi lama. Jabatan-jabatan ini umumnya diduduki anak keturunan golongan priyayi lama yang sudah berpendidikan modern;
- b. priyayi profesional yaitu golongan priyayi yang menduduki jabatan-jabatan pemerintah yang memerlukan pengetahuan dan ketrampilan tertentu.

---

<sup>12</sup> M.C Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. (Yogyakarta: Gajah Mada University Press,1993), hlm. 177.

<sup>13</sup> Nasution, *op.cit.*, hlm. 40.

<sup>14</sup> Savitri Prastiti Scherer *Keselarasan dan Kejanggalan. Pemikiran-Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa awal Abad XX*, (Jakarta: Sinar Harapan,1985), hlm. 53-54.

Berdasarkan dua pengertian priyayi dari Scherer tersebut, maka guru lulusan Sekolah Guru yang diberi gelar dan atribut kepriyayian termasuk kelompok priyayi profesional, karena mereka mempunyai pengetahuan dan keterampilan mengajar yang diperoleh melalui pendidikan Sekolah Guru.

Sekolah Guru yang pada taraf permulaan seperti sekolah rendah, mengalami peningkatan dan memperoleh kedudukan seperti sekolah menengah. Pada tahun 1871 kurikulumnya meliputi bahasa daerah, berhitung, geometri elementer, geografi, sejarah, ilmu alam, menggambar, pedagogik (teori dan praktek), menulis dan bernyanyi.

Program Sekolah Guru ditempuh selama 4 tahun meliputi pelajaran teori 3 tahun dan praktek mengajar pada suatu sekolah ektern (di luar Sekolah Guru). Dalam menempuh program Sekolah Guru, para siswa tinggal dalam asrama di bawah pengawasan yang ketat tentang kelakuan dan pelajaran mereka. Mereka menerima f. 12 sampai f. 15 sebagai biaya untuk membeli pakaian dan makanan, fasilitas Sekolah Guru yang menarik lainnya adalah:

- a. pendidikan guru bebas dari pembayaran uang sekolah, bahkan menerima uang saku setiap bulan.
- b. para lulusan sudah dapat dipastikan akan mendapat pekerjaan pada sekolah pemerintah dengan gaji yang baik dan status terhormat dalam masyarakat sebagai pegawai pemerintah dan orang intelektual.
- c. jalan bagi golongan menengah dan rendah dikalangan orang Indonesia untuk menikmati pendidikan lanjutan.

Sebagai akibat adanya fasilitas yang menarik di Sekolah Guru tersebut, maka jumlah pelamar meningkat pesat, maka diadakan-ujian seleksi dan mereka yang lulus harus memenuhi persyaratan tertentu.

## 2.2 Masa Politik Liberal

Pada masa Politik Liberal keadaan ekonomi Pemerintah Kolonial Belanda memburuk karena peperangan (Perang Aceh. selama 39 tahun) dan krisis gula tahun 1884 dan 1893. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah Kolonial Belanda melakukan penghematan termasuk pengurangan biaya pendidikan dengan

menutup beberapa Sekolah Guru dan perluasan sekolah rendah segera dihentikan. Akibatnya gaji guru dipotong secara drastis, karena ketidakmampuan pemerintah di bidang keuangan.

Pada tahun 1887 W.P. Groenevelt, Direktur Pengajaran Agama dan Industri mengajukan usul yang akhirnya menghasilkan reorganisasi sekolah tahun 1892. Groenevelt menganjurkan dua jenis sekolah yaitu:

- a. Sekolah Kelas Satu (Eerste Klasse School) untuk anak-anak pribumi golongan atas yang akan menjadi pegawai;
- b. Sekolah Kelas Dua (Tweede Klasse School) untuk rakyat pada umumnya.

Dua macam sekolah ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial Pemerintah Kolonial Belanda, karena sekolah rendah untuk pribumi sebelum reorganisasi tidak disesuaikan dengan kebutuhan penduduk. Contohnya kurikulum yang berlaku di sekolah rendah terdiri atas mata pelajaran yang sama dengan Sekolah Guru, kecuali ilmu mendidik.

Dua macam sekolah untuk anak-anak pribumi ini menggunakan pengantar bahasa daerah atau Bahasa Melayu. Dengan adanya dua macam sekolah ini lulusan Sekolah Guru biasanya dijadikan Kepala Sekolah Kelas Satu maupun Sekolah Kelas Dua (peraturan tahun 1876). Sesudah tahun 1900 Pemerintah Kolonial Belanda terpaksa mengangkat Kepala Sekolah dengan kualifikasi lebih rendah, karena kekurangan lulusan Sekolah Guru.

## 2.3 Masa Politik Etis

Pada tahun 1899 terbit sebuah artikel yang dibuat oleh C.Th. Van Deventer berjudul *Een Eereschuld* (hutang kehormatan) yang dimuat dalam majalah *De Gids* No. 63 tahun 1899<sup>15</sup>. Hutang kehormatan itu harus dibayar oleh Pemerintah Kolonial Belanda dengan cara memperbaiki irigasi, edukasi, dan transmigrasi.

Dalam bidang pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda melakukan tiga hal penting yaitu :

---

<sup>15</sup> Leirissa, R.Z. *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900- 1950*, (Jakarta: C.V. Akademika Pressindo, 1985), hlm. 22.

- a. Sekolah Kelas Satu tahun 1907 menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dan tahun 1914 diubah namanya menjadi Hollandsch Inlansche School (HIS) yang berbahasa Belanda;
- b. Mendirikan sekolah lanjutan yang bernama Meer Uitgebreid Laager Onderwijs (MULO) untuk lulusan HIS, lama pendidikan 3 tahun dan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar;
- c. Mendirikan sekolah lanjutan atas yang bernama Algemeen Middelbaare School yang menerima lulusan MULO.

Jadi pada masa politik etis jumlah sekolah rendah meningkat pesat, sekolah-sekolah yang berorientasi Barat diciptakan bagi orang Cina maupun orang pribumi. Pendidikan berkembang secara vertikal dengan didirikannya MULO dan AMS membuka kesempatan bagi anak-anak Indonesia daripada HBS (Hogere Burger School) untuk masuk ke universitas selama periode inilah akhirnya sistem pendidikan mencapai kelengkapan.

### III. KESIMPULAN

Peranan guru berkaitan dengan perkembangan sistem pendidikan yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial Belanda di Indonesia. Peranan guru dimulai pada masa VOC untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dan pengajaran yang berdasarkan keagamaan. Guru-guru didatangkan dari negeri Belanda oleh Gereja Reformasi di Amsterdam, dengan tugas mengajar murid-murid untuk belajar agama Kristen Protestan.

Peranan guru meningkat pada masa Sistem Tanam Paksa tahun 1830, karena Pemerintah Kolonial Belanda memerlukan tenaga kerja tingkat rendah yang dapat membaca, menulis, dan berhitung. Tahun 1848 Pemerintah Kolonial Belanda menyediakan anggaran belanja bidang pendidikan sebesar 25.000 gulden

untuk membiayai sekolah-sekolah yang mendidik pegawai tingkat rendah. Para siswa sekolah- sekolah ini dipilih dari anak-anak kaum ningrat.

Untuk memenuhi kebutuhan Guru bagi sekolah-sekolah ini, maka Pemerintah Kolonial Belanda membuka Sekoiah Guru (Kweek School). Sebelum Sekolah Guru dapat menghasilkan jumlah guru yang cukup, maka tidak ada syarat khusus untuk melakukan profesi ini. Akibatnya mutu pendidikan menjadi rendah, karena sarana dan prasarana proses belajar mengajar kurang memenuhi syarat. Untuk mengatasi hal tersebut, maka Pemerintah Kolonial Belanda pada tahun 1892 memutuskan untuk mengangkat guru tanpa pendidikan guru, tetapi melalui ujian guru. Selain itu muncul istilah guru bantu, guru magang dan guru darurat untuk mengatasi kekurangan guru.

Sekolah guru kurang memenuhi kebutuhan guru disebabkan karena jumlahnya masih sedikit dan peminatnya kurang. Untuk menarik minat siswa untuk memasuki Sekolah Guru, maka Pemerintah Kolonial Belanda berusaha memberikan kemudahan-kemudahan bagi siswa untuk memasuki Sekolah Guru dan memberikan fasilitas yang menarik bagi para guru. Secara politis peranan guru dianggap penting oleh Pemerintah Kolonial Belanda, karena ditangan mereka diharapkan muncul generasi penerus yang mempunyai loyalitas kepada Pemerintah Kolonial Belanda dan bagi pribumi peranan guru dapat meningkatkan status sosial mereka untuk memasuki dunia kepriyayan.

Perkembangan sekolah dan guru mengalami penurunan sebagai akibat pengurangan anggaran belanja bidang pendidikan. Hal ini disebabkan karena Pemerintah Kolonial Belanda mengalami krisis keuangan pada masa Politik Liberal. Keadaan mulai berubah pada masa Politik Etis dengan adanya perluasan kesempatan belajar dengan pendirian sekolah rendah maupun sekolah lanjutan. Selama periode ini sistem pendidikan mencapai kelengkapan dan peranan guru semakin meningkat.

## DAFTAR PUSTAKA

Burger, D.H. 1970. *Sejarah Ekonomi Sosiologi II*. Jakarta: t.p.

Chijs, J.A. van der. 1985. *Bijdragen van het Inlandesch Onderwijs in Nederlandsch Indie*. BKI. No 11 1984 dalam Scherer Savitri Prastiti, 1985. *Keselarasan dan Kejanggalan Pemikiran- Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa awal Abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan.

Leirissa, R.Z. 1985. *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900- 1950*. Jakarta : C.V. Akademika Pressindo.

Moh. Said. 1981. *Pendidikan Abad Keduapuluh. Dengan Latar Belakang Kebudayaan*. Jakarta: Mutiara.

Nasution, S. 1995. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.

R.A. Kartini. 1962. *Habis Gelap Terbitlah Terang*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ricklefs, M.C. 1993. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Sartono Kartodirdjo, 1975. *Sejarah Nasional IV*. Jakarta: Departemen P & K.

Sartono Kartodirdjo dkk, 1987. *Perkembangan Peradaban Priyayi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Scherer, Savitri Prastiti, 1985. *Keselarasan dan Kejanggalan. Pemikiran- Pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa awal Abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan.

ST. Vembriarto, 1981. *Kapita Selekta Pendidikan 1*. Yogyakarta: Yayasan Pendidikan Paramita.

Sutherland, Heather, 1983. *Terbentuknya Sebuah Elite Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan.